

PELAKSANAAN E-KLIPING BERBASIS E-GOVERNMENT PADA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANJAR

Akhmad Mustafa¹, Murdiansyah Herman², Fika Fibriyanita³

¹Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 17120038

²Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 1106038903

³Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 1121028801

Email : mustafasalman.h@gmail.com

ABSTRACT

AKHMAD MUSTAFA, NPM. 17120038 " As a further effort to support the implementation of e-government in order to improve the quality of services to the community, especially information services and create good governance. In summary, the purpose of e-government is to form a communication network among the public, private sector, and other governments that can facilitate interactions, transactions, and services. There are three elements of success that must be considered seriously. The first elements are support, capacity, and value (Indarjit in Sadikin, 2011).

In this study, researchers focus more on the elements of successful digitization in the public sector that must be owned and considered according to the results of studies and research from the Harvard JFK School of Government (Indarjit in Sadikin, 2011) namely Support, Capacity, and Value (Ability). Score.

The results of the study illustrate that the implementation of E-Clipping Based on E-Government at the Informatics Communications, Statistics and Encoding Office of Banjar Regency is quite effective.

Keywords: E-kliping, E-Government

ABSTRAK

AKHMAD MUSTAFA, NPM. 17120038 " Sebagai upaya lanjutan untuk mendukung pelaksanaan *e-government* dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan informasi dan menciptakan good governance. Secara ringkas tujuan *e-government* adalah untuk membentuk jaringan komunikasi diantara masyarakat, swasta, dan pemerintah lainnya yang dapat memperlancar interaksi, transaksi, dan layanan. Terdapat tiga elemen sukses yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Elemen tersebut adalah pertama *support*, *capacity*, dan *value* (Indarjit dalam Sadikin, 2011).

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada elemen sukses digitalisasi pada sektor publik yang harus dimiliki dan diperhatikan menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government (Indarjit dalam Sadikin, 2011) yakni *Support* (Dukungan), *Capacity* (Kemampuan), dan *Value* (Nilai).

Hasil penelitian menggambarkan bahwa Pelaksanaan E-Kliping Berbasis *E-Government* Pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Banjar sudah cukup efektif.

Kata Kunci: E-kliping, E-Government

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari globalisasi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat modern seperti sekarang ini, yang telah menempatkan tuntutan yang tinggi kepada masyarakat agar pemerintah sebagai penyedia layanan untuk lebih terbuka, efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas pemerintahan, serta memberikan kemudahan akses informasi, khususnya informasi. tentang pemerintahan, mendorong pemerintah untuk mengadopsi konsep pemerintahan yang baik, yang biasa disebut *good governance*. Untuk menjamin pelayanan publik yang baik, pemerintah harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak ketinggalan.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu: menciptakan tertib penyelenggaraan pemerintahan; menciptakan kepastian hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang untuk menjamin akuntabilitas instansi dan/atau pejabat pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara dan pejabat pemerintah; melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik; memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2014).

Sebagai upaya lebih lanjut untuk mendukung implementasi *e-government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat khususnya layanan informasi, dan menciptakan *good governance*. Singkatnya, tujuan *e-government* adalah untuk membangun jaringan komunikasi antara publik, sektor swasta dan pemerintah lainnya yang dapat memfasilitasi interaksi, transaksi dan layanan. *E-government* sebagai konsep layanan dengan menggunakan teknologi informasi dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu persiapan pertama; kedua, pematangan; ketiga, stabilisasi; dan keempat, penggunaan. Agar pengembangan *e-government* dapat berjalan dengan lancar sesuai tahapan *e-government*, ada tiga faktor keberhasilan yang harus diperhatikan secara serius. Elemen pertama adalah dukungan, kapasitas dan nilai (Indarjit dalam Sadikin, 2011).

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Coding Kabupaten Banjar berdiri sejak tahun 2016. Pembentukan Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Coding Kabupaten Banjar diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kota Banjar Peraturan Daerah Kota Perangkat Bupati No. 67 Tahun 2016 Dengan memperhatikan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Coding, diharapkan penguatan kelembagaan di bidang informatika sejalan dengan tujuan Pemerintah saat ini adalah memprioritaskan penggunaan teknologi (elektronik) untuk mendukung terselenggaranya pelayanan birokrasi, selain tugas badan komunikasi utama. Hal ini terkait erat dengan teknologi informasi dan komunikasi yang menjanjikan efisiensi, kecepatan penyediaan informasi, jangkauan global dan transparansi.

Dengan misi “Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat Melalui Teknologi Informasi”, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Enkripsi, Kabupaten Banjar menunjukkan keseriusannya dalam membawa Martapura menjadi kota pintar melalui program *E-Kliping*. Menurut (Widyafitri, 2013: 3), *E-Clipping* sangat penting karena memudahkan penyebaran informasi dan dapat menghemat biaya, seperti membeli kertas, tinta dan lain-lain.

Namun dalam pelaksanaannya, penyebaran informasi menggunakan *e-clipping* belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena kurangnya sosialisasi tentang *e-government* oleh Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Sandi Kabupaten Banjar. Untuk mencapai *tata pemerintahan yang baik*, tujuannya antara lain untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. *E-clipping* diharapkan dapat memaksimalkan penyebaran informasi kepada masyarakat dan dilakukan untuk mempermudah pendataan laporan kehumasan pemerintah Kabupaten Banjar serta organisasi pemerintah daerah yang dapat dimudahkan dalam hal pencarian berita kegiatan oleh penulisan kata kunci yang berbeda yang nantinya akan muncul dengan sendirinya sesuai dengan berita yang disiarkan di media. .

Hasil penelitian Risnandar (2019) menyimpulkan bahwa bentuk implementasi *eGovernment* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah sudah cukup baik. ada beberapa hal yang sudah cukup

bagus seperti Modal dan *Content Development* dan *Konektivitas*, walaupun masih perlu ditingkatkan. Yang dianggap tidak memadai adalah *kompetensi Membangun dan Antarmuka Warga*. Sedangkan *Cyber Laws* tidak ditinjau karena bersifat nasional, sehingga Pemerintah Nasional harus membenahinya. Demikian pula hasil penelitian Siti Mutia Nurcahyani Liputo (2015) di Universitas Hasanuddin berjudul Implementasi e-government di kantor desa di kantor kecamatan Karampuang, kabupaten Panakkukang, kota. Bahwa penerapan urban e-government di Kantor Desa Karampuang diukur dari segi efektivitas dengan menggunakan kriteria pengukuran efektivitas menurut Gibson yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, adaptabilitas dan kelangsungan hidup, cukup efektif. Terbukti dengan terpenuhinya 3 indikator diatas, saat ini pelayanan yang diberikan perangkat Desa Karampuang cukup maksimal setelah adanya e-government kelurahan ini. Selain itu, pelayanan yang diproses melalui e-government kelurahan lebih menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan manual. Masyarakat yang menerima pelayanan cukup puas dengan pelaksanaan program ini. Perangkat menyesuaikan dengan program berbasis IT ini dan program ini akan semakin optimal kedepannya. Dari latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Implementasi E-Government Berbasis E-Clipping Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Encoding Kabupaten Banjar".

penelitian

Fokus Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada unsur-unsur keberhasilan digitalisasi di sektor publik yang harus dimiliki dan diperhatikan menurut hasil kajian dan penelitian dari Harvard *JFK School of Government* (Indarjit dalam Sadikin, 2011), yaitu *support*, *capacity* dan *value*.

Masalah

- 1). Rumusan Bagaimana implementasi e-Kliping berbasis *e-Government* menurut hasil kajian dan penelitian dari Harvard *JFK School of Government* (Indarjit dalam Sadikin, 2011) yaitu *support* (dukungan),

capacity (daya) dan *value* (nilai) pada dinas komunikasi informatika, statistika dan koding Kabupaten Banjar?

- 2). Apa kendala dalam penerapan berbasis E-Kliping *eGovernment* di Kementerian Komunikasi, Informatika, Statistik dan Enkripsi di Kabupaten Banjar?

Tujuan Penelitian Untuk

- 1). mengetahui proses implementasi e-Clipping berbasis *e-Government* pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Koding Kabupaten Banjar.
- 2). Mengetahui berbagai kendala dalam melaksanakan E-kliping berdasarkan *e-Government* di Departemen Komunikasi, Informatika, Statistik dan Coding, Kabupaten Banjar.

Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan ide-ide yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya administrasi publik, serta sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan yang dapat dibaca oleh masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

- 1). Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang *E-Government* pada Dinas Komunikasi, Komputasi, Statistika dan Enkripsi Kabupaten Banjar.
- 2). Bagi pembaca, survei ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi tertulis, serta referensi tentang *eGovernment* di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Enkripsi Kabupaten Banjar.
- 3). Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan terkait peningkatan akses informasi publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Implementasi

Implementasi didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan suatu rencana atau program dalam kenyataan.

Menurut Mazmanian dan Sebatier (2014:16), "implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan yang mendasar, biasanya berupa undang-undang, tetapi bisa juga berupa perintah atau keputusan badan eksekutif utama atau keputusan yudikatif"

Menurut Tjokroadmudjoyo (2014:7) "Implementasi adalah suatu proses yang berupa rangkaian kegiatan, dimulai dari suatu kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, kemudian menurunkan kebijakan tersebut menjadi suatu program dan proyek.

Menurut Wiestra, dkk (2011:12)" implementasi adalah upaya yang dilakukan untuk semua rencana dan kebijakan yang dirumuskan dan bertekad untuk melaksanakan sampai akhir, yang akan melakukan semua instrumen yang diperlukan, yang akan dilaksanakan dan kapan akan mulai.

"dapat disimpulkan dari definisi di atas bahwa implementasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau lembaga secara terencana, terorganisir dan terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan hitungan, serta operasional atau kebijakan dalam kenyataan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tujuan program ditentukan.

Pengertian Publik

Pelayanan adalah memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat di segala bidang. Melayani masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi penyelenggaraan negara. Pada prinsipnya pelayanan dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang, kelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.

Monir mengatakan dalam Articleong (2014: 128) bahwa pelayanan adalah suatu proses dimana kebutuhan dipenuhi melalui kegiatan orang lain secara langsung. Audience pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris crowd yang berarti masyarakat umum, masyarakat umum, rakyat dan rakyat.

Syafilia dkk dalam Articleong (2013:6), mengatakan bahwa masyarakat

adalah sekumpulan orang yang bersama-sama memiliki pikiran, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan norma-norma yang dimilikinya.

H. George Frederickson dalam articleong (2013:6) menjelaskan konsep khalayak dalam lima perspektif, yaitu (1) publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dipandang sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang meningkatkan kepentingan masyarakat, (2) publik sebagai pemilih rasional, yaitu masyarakat terdiri dari individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingannya sendiri, (3) publik sebagai wakil kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik yang diwakili oleh "suara". (4) Masyarakat sebagai konsumen yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak terkait satu sama lain, tetapi dalam jumlah yang cukup untuk menciptakan tuntutan pelayanan birokrasi. Oleh karena itu kedudukannya juga dianggap publik, dan (5) Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap publik karena partisipasi masyarakat sebagai partisipasi warga dalam segala aspek kehidupan. proses pemerintahan dipandang sebagai yang paling penting.

Pelayanan publik adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang dan/atau sekelompok orang atau badan tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan. Pelayanan publik menurut Sinambela dalam Articleong (2014: 128), adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah orang yang mempunyai suatu kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kelompok atau kesatuan, dan memberikan kepuasan, walaupun hasilnya tidak mengikat. menjadi produk fisik.

Agung Kurniawan dalam Articleong (2014:128) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) terhadap kebutuhan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam organisasi sesuai dengan aturan dasar dan tata cara yang ditetapkan. Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani kebutuhan masyarakat. atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang berkepentingan dengan organisasi tersebut, sesuai dengan aturan dasar dan prosedur yang ditetapkan dan bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan (Hardiyansyah, 2011:12).

Setiap orang pada dasarnya menginginkan pengakuan dan harga diri pada orang lain. Demikian juga setiap bawahan dalam organisasi membutuhkan pengakuan dan penghargaan dari atasan. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi pemimpin untuk bersedia memberikan penghargaan atau pengakuan dalam bentuk apapun kepada bawahannya berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses

mempengaruhi, menggerakkan, mengarahkan, mendorong dan mengajak orang lain untuk bekerja secara kolaboratif dan produktif menuju pencapaian tujuan tertentu, sehingga indikator yang digunakan dalam variabel kepemimpinan menggunakan teori Wahjosumidjo yaitu: bersikap jujur, memberi saran, mendukung pencapaian tujuan, sebagai katalisator, menciptakan rasa aman, sebagai wakil organisasi, sumber inspirasi dan rasa hormat.

Kualitas pelayanan publik

Kualitas pada dasarnya adalah sebuah kata yang memiliki arti relatif karena bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya (Pasal 2013:132). Apabila persyaratan atau spesifikasi tersebut terpenuhi, berarti kualitas barang yang bersangkutan dapat dikatakan baik, sebaliknya dapat dikatakan tidak baik jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi.

Kualitas menurut Fandy Tjiptono dalam Articleong (2013:132) adalah

1. Kesesuaian dengan persyaratan/persyaratan
2. Kesesuaian untuk digunakan
3. Memperbaiki atau meningkatkan daya tahan
4. Bebas dari kerusakan
5. Memenuhi kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat
6. Melakukan segalanya dengan benar sejak awal
7. Sesuatu yang dapat membuat pelanggan senang/tujuan

dari pelayanan publik di Intinya adalah untuk memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan tersebut diperlukan kualitas pelayanan yang prima, yang tercermin dari:

1. Transparansi, yaitu pelayanan yang terbuka, mudah dan dapat diakses

oleh semua pihak yang membutuhkan dan diberikan secara memadai dan dapat dipahami.

2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3. Conditional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan, namun tetap memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas.
4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Persamaan hak, yaitu pegawai yang tidak membedakan dalam aspek apapun terutama suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Pengertian e-government

Electronic government berasal dari kata bahasa Inggris electronics government, disebut juga e-gov, adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada warganya, urusan bisnis dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan. Pemerintah elektronik dapat diterapkan pada legislatif, yudikatif atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, memberikan layanan publik atau proses pemerintahan yang demokratis. Secara umum, konsep e-government adalah sistem manajemen informasi dan pelayanan publik berbasis internet. Layanan ini diberikan kepada rakyatnya oleh pemerintah. Budi Rianto dkk (2012:36) menyimpulkan bahwa E-Government adalah suatu bentuk aplikasi untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pemerintahan dengan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi E-Government menawarkan peluang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antara instansi

pemerintah, hubungan antara pemerintah dan bisnis dan masyarakat. Mekanisme hubungan tersebut melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi. Menurut Bank Dunia, e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah, seperti internet wide area network (WAN), mobile competition, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan publik, bisnis dan instansi pemerintah lainnya. Menurut The World Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), e-government adalah upaya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Karena visi berasal dari “Van, Door en Voor” komunitas atau komunitas dimana E-Government diimplementasikan, maka waktunya tergantung situasi dan kondisi masyarakat setempat. Sebagaimana disebutkan di atas, e-government merupakan upaya penerapan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Unsur-unsur keberhasilan e-government

di lapangan Menurut hasil kajian dan penelitian dari Harvard JFK School of Government (Indrajit dalam Sadikin, 2011), ada tiga unsur keberhasilan yang harus dimiliki agar dapat menerapkan konsep-konsep digitalisasi di sektor publik yang tepat dan serius dipertimbangkan. Masing-masing elemen keberhasilan tersebut adalah: dukungan, kapasitas, dan nilai.

a. Support Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki pemerintah adalah keinginan (niat) berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar mengimplementasikan konsep e-government, bukan sekedar tren atau inisiatif yang berlawanan mengenai prinsip-prinsip yang harus diikuti. Pemerintah. Tanpa unsur “political will” ini, tidak mungkin berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government dapat berjalan dengan lancar. Karena budaya

birokrasi cenderung beroperasi atas dasar model manajemen “top-down”, jelas bahwa dukungan untuk implementasi program eGovernment yang efektif harus dimulai dengan para pemimpin pemerintahan tingkat atas (presiden dan asistennya – menteri) sebelum menyebar ke tingkat yang lebih rendah. (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya). Yang dimaksud dengan dukungan di sini bukan hanya sekedar omongan, tetapi lebih jauh lagi, dukungan yang diharapkan berupa: pertama, kesepakatan kerangka eGovernment sebagai salah satu kunci keberhasilan negara dalam mencapai visi dan misi negara. negara, sehingga harus menjadi prioritas tinggi ketika menangani kunci sukses lainnya. Kedua, alokasi sejumlah sumber daya (manusia, keuangan, tenaga, waktu, informasi, dll) di setiap tingkat pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektor. Ketiga, pembangunan berbagai infrastruktur dan suprastruktur pendukung untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan e-Government (seperti adanya undang-undang dan peraturan pemerintah yang jelas, alokasi lembaga khusus – seperti e-Envoy-agent – sebagai penanggung jawab utama, penyusunan aturan untuk kerjasama dengan sektor swasta, dll); dan keempat, sosialisasi konsep e-government secara merata, berkesinambungan, konsisten dan menyeluruh kepada seluruh birokrat pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui berbagai metode kampanye yang simpatik.

b. *Kapasitas* Yang dimaksud dengan unsur kedua ini adalah adanya unsur kompetensi atau pemberdayaan pemerintah daerah dalam mewujudkan “impian” e-government terkait dengan kenyataan. Ada tiga hal minimal yang harus dimiliki pemerintah dalam hal apapun di bidang ini, yaitu: pertama, ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mengimplementasikan berbagai inisiatif e-government, terutama yang terkait dengan sumber

daya keuangan, kedua, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini. adalah 50% dari kunci keberhasilan implementasi konsep e-Government; dan ketiga, ketersediaan sumber daya manusia dengan kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan untuk menyelaraskan implementasi e-government dengan prinsip manfaat yang diharapkan. Pemerintah, terutama karena banyak fasilitas dan sumber daya penting yang berada di luar jangkauan (area of control) pemerintah. Sebaliknya, pemerintah harus menemukan cara yang efektif untuk memenuhi ketiga syarat dalam waktu singkat, misalnya melalui kerjasama dengan swasta, kerjasama dengan pemerintah daerah/tetangga, merekrut sumber daya manusia terbaik dari sektor non-publik, outsourcing berbagai teknologi. yang tidak dimiliki, dan sebagainya.

- c. Nilai Unsur pertama dan kedua merupakan dua aspek yang dilihat dari sudut pandang pemerintah sebagai penyedia jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif eGovernment tidak ada artinya jika tidak ada pihak yang diuntungkan dari implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini bukan pemerintah sendiri yang menentukan sejauh mana manfaat dari keberadaan e-Government, melainkan masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (*demand side*). Untuk itu, pemerintah harus sangat berhati-hati dalam memilih jenis prioritas *aplikasi e-government* untuk diprioritaskan pengembangannya sehingga benar-benar memberikan nilai (manfaat) yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Kesalahpahaman tentang apa yang dibutuhkan masyarakat akan menjadi bumerang bagi pemerintah, sehingga semakin sulit untuk melanjutkan upaya pengembangan konsep *e-government* lebih lanjut.

METODE

Dalam penelitian yang berjudul “E-Clips Pelaksana Berbasis E-Government Pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Coding Banjar” (Inpres 3 Tahun 2003 tentang

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*), penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2015:6) adalah “penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara historis dan melalui deskripsi berupa kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang alami dan dengan menggunakan metode alami yang berbeda.” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan argumentasi hukum, filosofis dan sosiologis untuk implementasi kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas E-Government, khususnya program E-Kliping Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Enkripsi Kabupaten Banjar – permasalahan yang diteliti. tidak akan tersebar luas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Coding Kabupaten Banjar berdiri sejak tahun 2016. Pembentukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Enkripsi Kabupaten Banjar diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 mber 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Banjar Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, diharapkan penguatan kelembagaan pada h Bidang ilmu komputer akan berlangsung sejalan dengan tujuan pemerintah saat ini yang mengutamakan penggunaan teknologi (elektronik) untuk mendukung terselenggaranya pelayanan birokrasi. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Enkripsi Kabupaten Banjar beralamat di Jl. A. Yani No. 3 KM. 39 Martapura. Kode Pos 70611, Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil Penelitian

Data dari temuan tersebut kemudian akan dideskripsikan secara deskriptif dan kualitatif dianalisis dengan menggunakan teori unsur keberhasilan *implementasi E-Government* menurut *Harvard JFK School of Government*, yaitu bagaimana *E-clipping*

berbasis *E-government* di Biro Komunikasi, Komputasi, Statistik dan Enkripsi, Kabupaten Banjar.

Mendukung Pelaksanaan

E-Government di tingkat kabupaten benar-benar membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat Provinsi Kalimantan Selatan dan pemangku kepentingan terkait. Dukungan mereka diperlukan untuk memastikan implementasi E-Government di Kabupaten Banjar berjalan lancar dan sesuai rencana. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa regulasi sebagai landasan hukum, perencanaan atau perencanaan yang jelas dan inovasi yang direncanakan ke depan. Selain itu, bantuan berupa infrastruktur pendukung dan pelatihan tenaga ahli juga penting. Keseriusan layanan komunikasi informasi, statistik dan enkripsi Kabupaten Banjar di Kabupaten Banjar sangat penting karena menyangkut kinerja pelayanan publik kepada masyarakat berbasis teknologi informasi. Berdasarkan hasil wawancara, Biro Komunikasi, Informatika, Statistik dan Koding Kabupaten Banjar menunjukkan keseriusan dalam menerapkan E-Government di Kabupaten Banjar.

Kapasitas (Capacity) Dalam

penerapan E-Kliping berbasis E-Government di Kabupaten Banjar, kapasitas sumber daya harus diperhitungkan. Kapasitas yang dimaksud erat kaitannya dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, keberadaan infrastruktur pendukung teknologi informasi dan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Kapasitas juga dimaksudkan sebagai landasan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan publik berbasis eGovernment. Jika suatu kota memiliki kapasitas sumber daya yang buruk, dapat dipastikan kinerja pelayanan publik di kelurahan tidak dapat optimal.

Sumber daya manusia sangat penting karena berperan sebagai administrator atau orang yang melakukan E-Clipping. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kemampuan di bidang teknologi informasi dan juga jumlah pegawai yang menguasai bidang tersebut sehingga implementasi E-Clipping berbasis E-Government di Kabupaten Banjar dapat berjalan dengan lancar. Namun sayang,

jumlah pakar teknologi informasi yang hanya berjumlah 2 orang masih sangat langka.

Nilai Dampak

penerapan E-Kliping berdasarkan *E-Government* adalah bahwa penyebaran informasi berita kepada masyarakat dapat efektif dan efisien. Otomatisasi memudahkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. E-clipping Hal ini juga dilakukan untuk mempermudah pengumpulan laporan kehumasan dari Pemerintah Kabupaten Banjar dan dari organisasi pemerintah daerah. di media. Secara administratif juga menjadi lebih jelas dan mengurangi sampah kertas karena semua arsip laporan sudah online. Tidak seperti di masa lalu, di mana pengarsipan masih diminati, diperlukan lokasi penyimpanan yang besar. Dampak dan manfaat penerapan E-Kliping E-Government tidak hanya dirasakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar tetapi juga oleh masyarakat sekitar. Mengingat tujuan penerapan E-Government adalah untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan publik. Penulis juga telah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai dampak dan manfaat penerapan e-government dalam hal pelayanan publik melalui wawancara dengan berbagai warga.

Kesimpulan

Berdasarkan *dukungan dari* Pemerintah Kabupaten Banjar, implementasi E-clipping berbasis E-Government sudah sangat baik. Bentuknya berupa regulasi yang akan menjadi landasan hukum penerapan E-Government di tingkat kabupaten. Berdasarkan *kapasitas tersebut*, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Enkripsi telah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menyediakan berbagai infrastruktur teknologi informasi guna mendukung implementasi e-government. Sementara itu, ketersediaan sumber daya manusia di bidang ahli teknologi informasi masih sangat langka. Berdasarkan *nilai tersebut* dapat disimpulkan bahwa baik pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Banjar telah merasakan dampak positif dari penerapan E-clipping berbasis E-Government.

Dari sisi pemerintah, dampak penerapan E-clipping berbasis E-Government adalah mempermudah pengumpulan laporan

humas pemerintah Kabupaten Banjar, serta organisasi pemerintah daerah yang dapat difasilitasi dalam hal kegiatan pencarian berita. dengan menuliskan kata kunci yang berbeda yang akan muncul dengan sendirinya sesuai dengan siaran berita di media. Sementara itu, mereka sangat puas dengan pelayanan publik melalui E-Kliping dari masyarakat karena penyampaian informasi lebih cepat dan tidak perlu ke pasar untuk membeli koran karena semua berita disediakan secara cuma-cuma oleh Dinas Perhubungan. , Informasi , statistik dan pengkodean.

Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi penerapan E-Kliping berbasis E-Government di Kabupaten Banjar khususnya untuk pelayanan publik dalam hal penyebaran informasi yang cepat dan tepat sasaran. De suggesties zijn onder meer:

1. Verhoging van het aantal human resources die experts zijn op het gebied van informatietechnologie, omdat twee mensen in het bureau voor communicatie, informatica, statistiek en versleuteling zeer ontbrekend worden geacht.
2. Het houden van training over het gebruik van informatietechnologie voor senior medewerkers van het Bureau voor Communicatie, Informatie, Statistiek en Codering, zodat de dienstverlening nog efficiënter kan zijn, want als je alleen op jonge medewerkers vertrouwt, is het aantal veel minder.
3. De toepassing eenvoudiger en efficiënter maken omdat sommige van de E-Kliping-functies nog steeds ingewikkeld zijn in hun werking.
4. Het uitvoeren van periodieke updates van informatietechnologie-apparaten omdat de technologie zich snel blijft ontwikkelen.

REFERENTIES

A. Website

BANJAR, KK (2021, 4 28). Genomen van <https://kominfo.banjarkab.go.id/>

(nd). Genomen uit

<https://media.neliti.com/media/publications/98693-ID-analysis-pengembangan-electronic-governm>

B. Jurnal

Fitri, W. (2013). Ontwikkeling van een Digitale E-Clipping Applicatie op basis van de Bandung Service website. 32.

Habibullah, A. (2010). Studie van het gebruik en de ontwikkeling van e-overheid. 187-195.

C. boek

Hardiyansyah's. (2011). *Kwaliteit van openbare diensten. concepten, dimensies, indicatoren en diensten.* Yogyakarta: gava media.

Falih, S. (2010). *Revitalisering van het staatsbestuur: bureaucratische hervorming en e-governance.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Indrajit, RE (2005). *e-Overheid IN ACTIE.* Yogyakarta: ANDI.

Indrajit, opnieuw (2006). *elektronische overheidsontwikkelingsstrategie en op technologie gebaseerde ontwikkeling van openbare dienstsysteem.* Yogyakarta: andi.

D. Wet- en

regelgeving Banjar Regency Regionale verordening nr. 13 van 2016 betreffende de vorming en structuur van regionale apparatuur Artikel 3 van wet nr. 30 jaar 2014 Wet die het beleid van de overheid en deregelt overheidin termen van verbetering van de openbare dienstverlening PERMENPAN nummer 36 van 2012 betreffende technische richtlijnen voor de voorbereiding, bepaling en toepassing van servicenormen